

Pendidikan Kewarganegaraan
Matana University

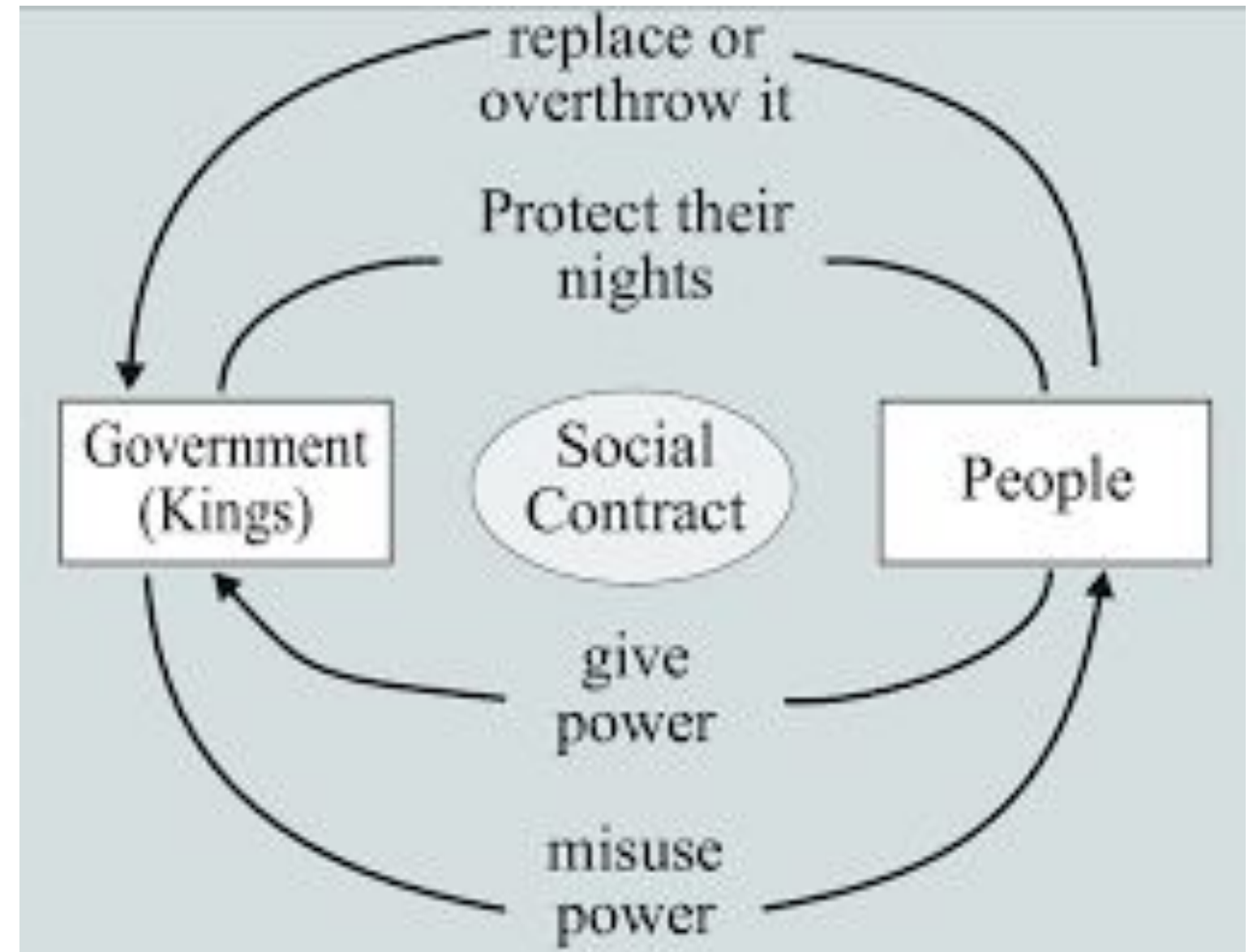
Pertemuan 5 Konstitusi



Althien John P, M.Phil

KONTRAK SOSIAL

Teori kontrak sosial adalah gagasan bahwa **negara** dan **pemerintahan** terbentuk dari sebuah **kesepakatan** sukarela antara **individu-individu** (rakyat) untuk melepaskan sebagian hak alami mereka demi kehidupan yang lebih teratur dan aman.



Hubungan Timbal Balik yang Didasari Kontrak

- **Negara adalah Pelayan Rakyat:** teori kontrak sosial menegaskan bahwa **kekuasaan negara berasal dari rakyat.**
- **Hukum adalah Kesepakatan Bersama:** Hukum memperoleh legitimasinya karena dibuat dan disepakati oleh rakyat atau perwakilan mereka.

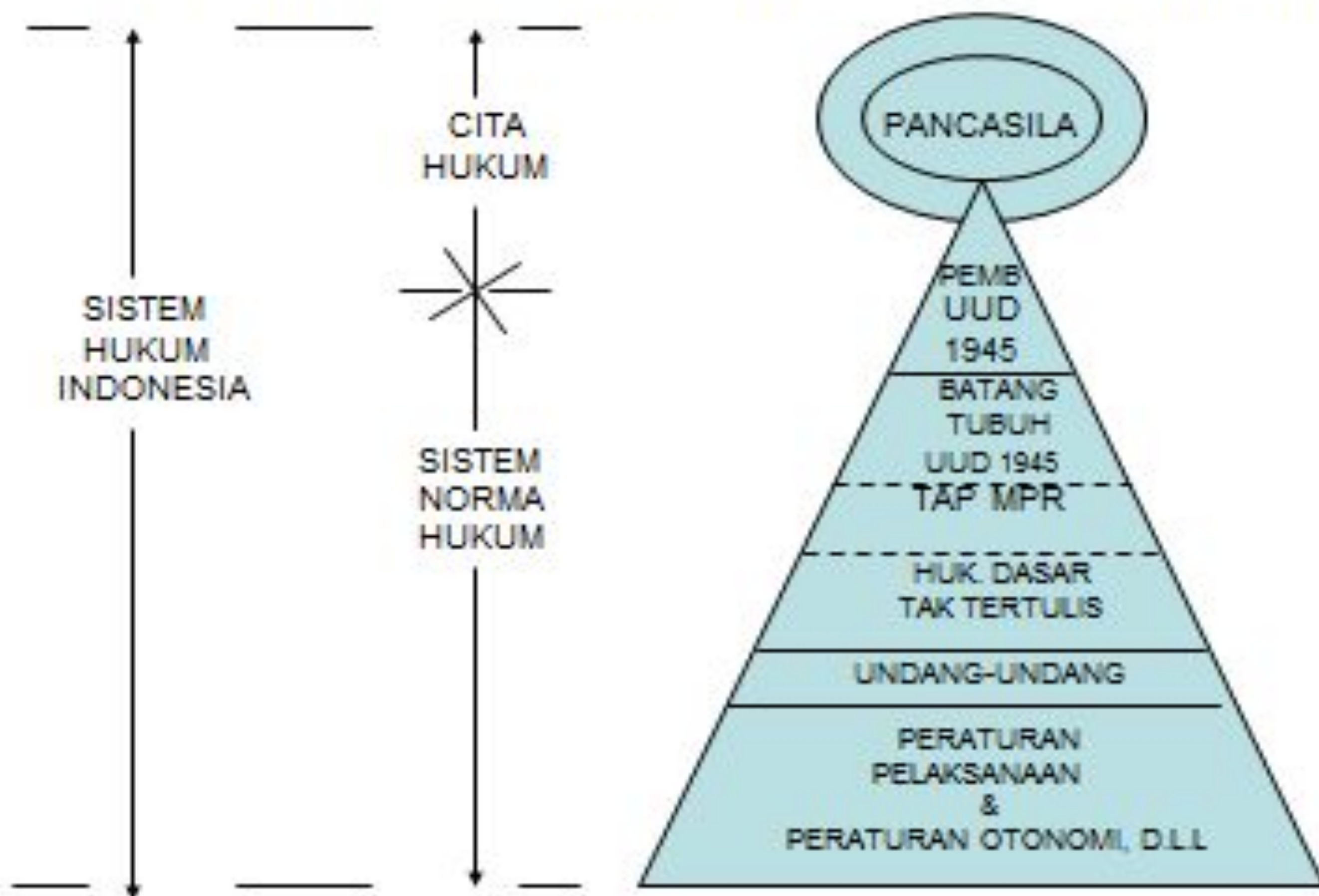


Rule of Law ☐

- Negara hukum
- Penyelenggara negara dan warga negara terikat hukum tanpa terkecuali (*Equality before the Law*)
- Undang-undang adalah jalan tengah
- Julius Stahl: terdapatnya perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasar undang-undang, peradilan Tata Usaha Negara.



GAMBAR
TATA URUTAN NORMA HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA



KONSTITUSI

- Konstitusi adalah naskah dasar atau naskah awal yang mengatur kaidah-kaidah fundamental bernegara dan meliputi semua bangunan hukum dan organisasi yang ada di negara tersebut.
- Di dalamnya juga diatur aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga-lembaga negara, termasuk dasar hubungan kerja sama antar-negara dan masyarakat yang merupakan refleksi nilai-nilai dasarnya.
- Tiga substansi dasar konstitusi Sri Soemantri:
 - jaminan HAM,
 - Susunan ketatanegaraan yang mendasar
 - Pembagian dan pembatasan kekuasaan.



- Konstitusi: kata kerja bhs Perancis **constituer (membentuk)**
- Wirjono Prodjodikoro: konstitusi □ **peraturan dasar (awal)** mengenai pembentukan suatu negara
- Konstitusi ≠ UUD (grondwet, belanda)
- Konstitusi: meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis
- Miriam Budiardjo: **konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sementara undang-undang dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi.**

Konstitusi untuk demokratisasi Negara dan Warga Negara

- Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis adalah konstitusi yang mengandung prinsip2 dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:
1. **Warga negara** sebagai sumber utama kedaulatan
 2. Mayoritas berkuasa dan **terjaminnya hak minoritas**
 3. Adanya jaminan penghargaan terhadap **hak-hak individu**
 4. **Pembatasan pemerintahan**
 5. Jaminan terhadap **keutuhan negara nasional dan integritas wilayah**
 6. Jaminan **berlakunya hukum dan keadilan** melalui proses peradilan yang independen
 7. **Pembatasan dan pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan kontrol keseimbangan (check and balance)** terhadapnya.

KONSTITUSI

NORMA

Konstitusi merupakan prinsip Fundamental seperti tampak dalam hirarki hukum di Indonesia. Norma ini memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi semua peraturan dan undang-undang di bawahnya (Hirarkis). Artinya, setiap hukum yang ada, dari undang-undang hingga perda diharuskan sesuai dengan norma-norma konstitusi. Konstitusi menetapkan **hak dan kewajiban dasar warga negara**, serta **tujuan bernegara**.

DASAR



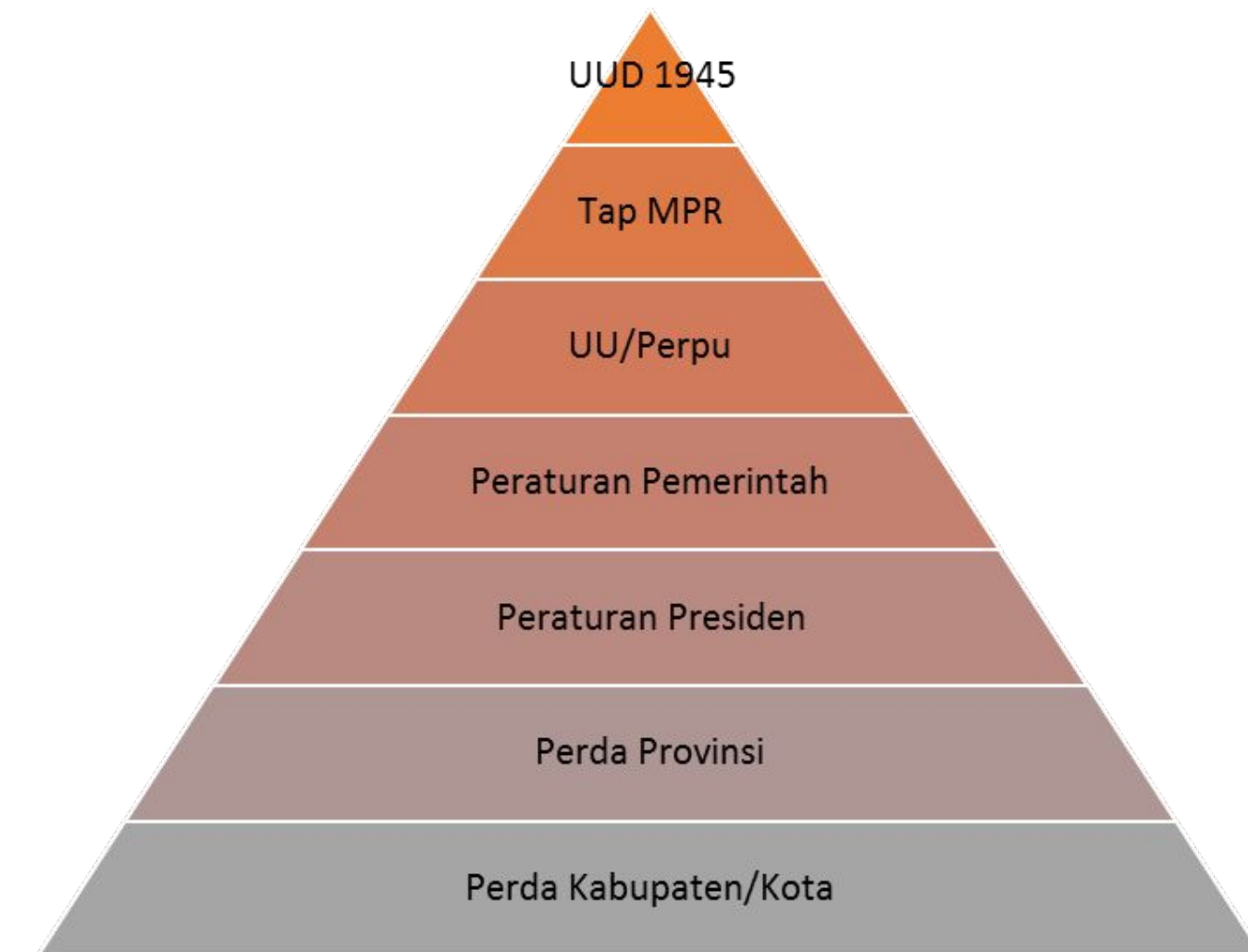
KONSTITUSI

Sumber

Hukum

Lain

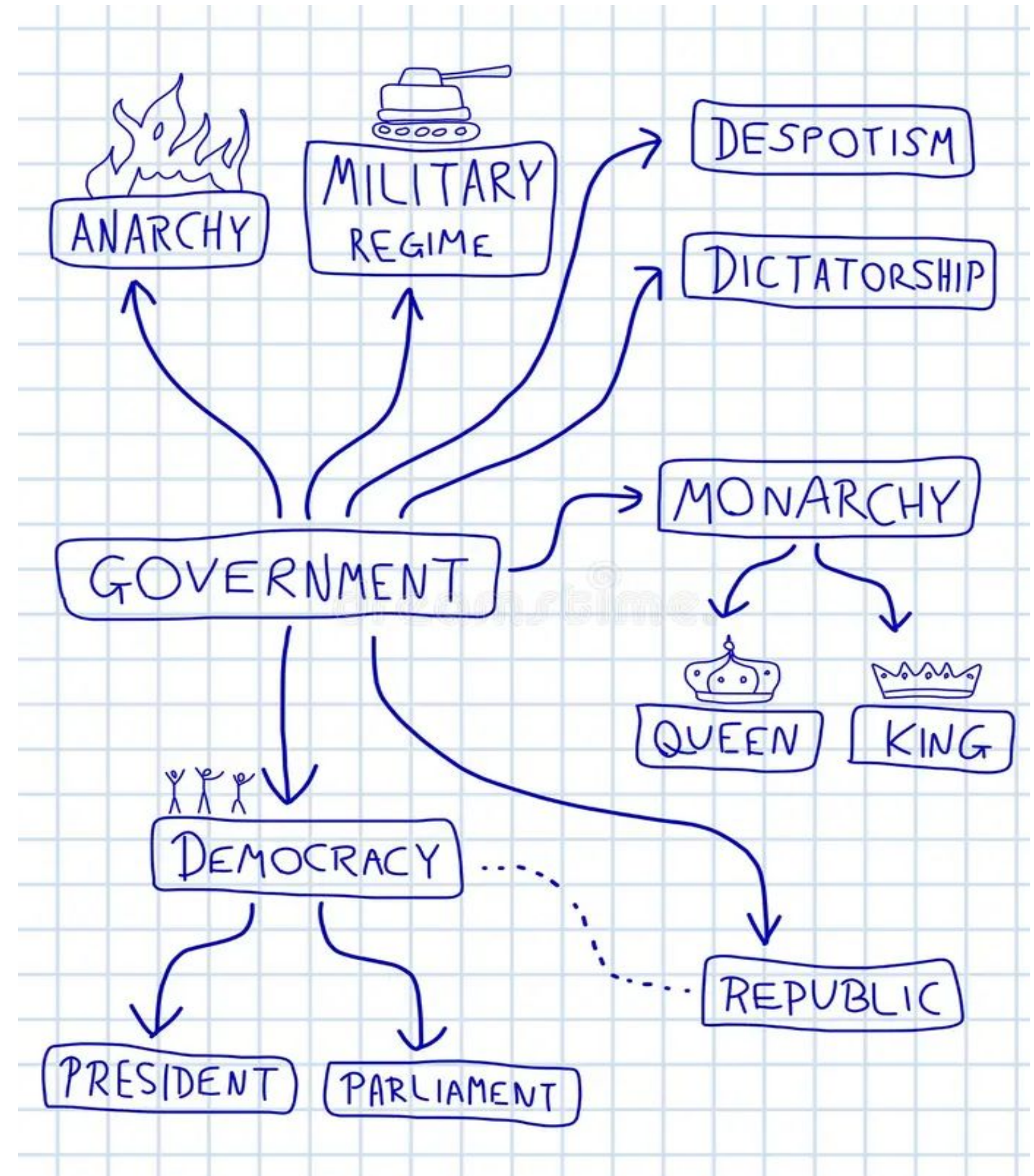
Konstitusi berperan sebagai **sumber hukum lainnya** karena ia menjadi **acuan dan payung hukum**. Sistem hukum bersifat hirarkis, artinya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya harus selalu konsisten dan sejalan dengan konstitusi. Jika ada suatu undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Peran MK dan Uji Materi (*judicial review*).

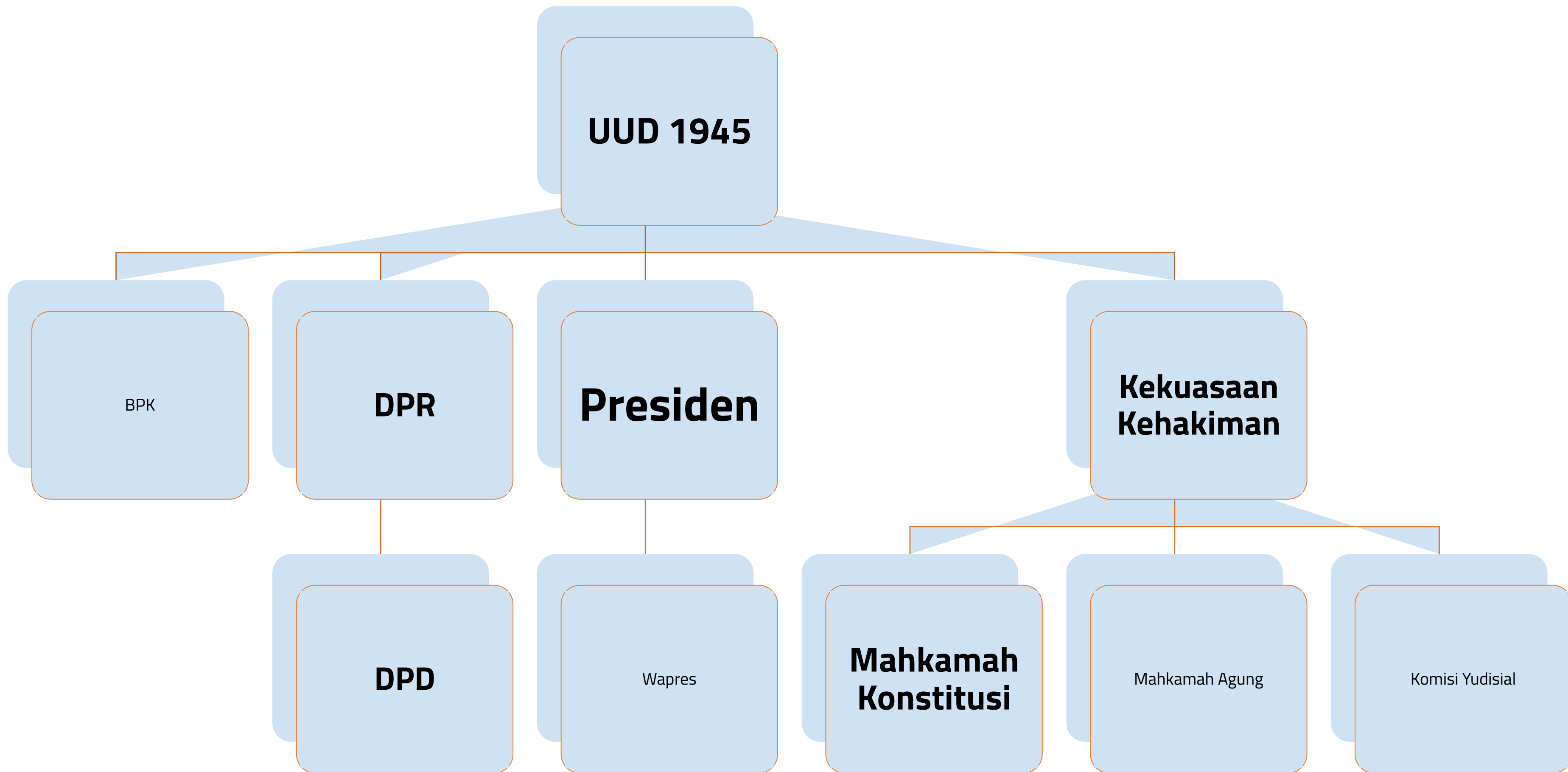


KONSTITUSI

Tata Sistem Politik

Konstitusi mengatur struktur, peran, dan relasi antar lembaga negara. Konstitusi juga mengatur bagaimana kekuasaan itu diperoleh (melalui pemilihan umum), berjalan dan diubah. Konstitusi menjamin stabilitas politik dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan sosial kontrak.





KONSTITUSI

Amandemen konstitusi atau perubahan konstitusi dilaksanakan melalui **prosedur formal** yang ditetapkan secara spesifik dalam norma hukum tertinggi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan **mekanisme yang ketat dan terperinci** agar **mencegah penguasa atau kelompok politik yang sedang berkuasa melakukan perubahan sepihak**. Perubahan terhadap dokumen fundamental negara wajib mencerminkan **kehendak rakyat** yang kuat dan memiliki **legitimasi**.

Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 hingga 2002

- 1 Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999
- 2 Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000
- 3 Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001
- 4 Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002



Sejarah Konstitusi di Indonesia



UUD 1945

Konstitusi RIS

UUD Sementara

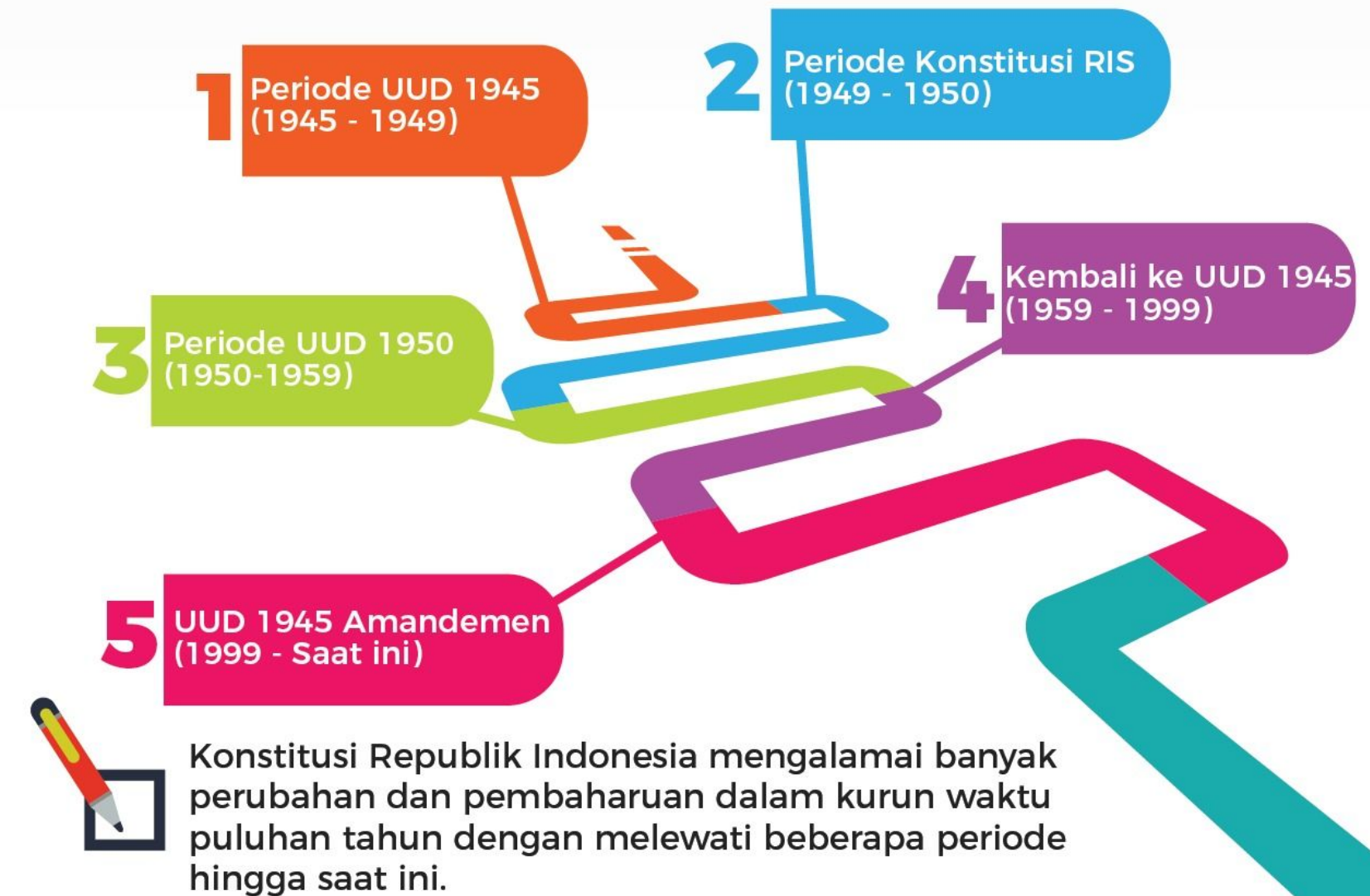
UUD 1945
(Amandemen)

Dinamika Konstitusi Indonesia



- Konstitusi UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
- Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
- Konstitusi UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
- Konstitusi UUD 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1998)
- Konstitusi UUD 1945 Amandemen (1999-sekarang)

Sejarah perkembangan UUD (Konstitusi) di Indonesia



AMANDEMEN KONSTITUSI

- Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR (DPR 575 DPD 136)
- Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR



AMANDEMEN KONSTITUSI

- Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR **(DPR, DPD, PEMDA TK 1, utusan golongan masyarakat)**
- Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya



AMANDEMEN UUD 1945 **CARA MENGUBAH KONSTITUSI**

Polemik perihal masa jabatan presiden, yang tercetus pada 2019, kini kembali menghangat. Seorang politikus menyebut ada upaya mengubah konstitusi sehingga Joko Widodo dapat menjadi Presiden 3 Periode—gagasan yang lantas ditolak Jokowi. Apa yang harus ditempuh jika Amandemen UUD 1945 hendak dilakukan?

PASAL 37 UUD 1945 **MEKANISME PERUBAHAN**

Pasal 37 UUD 1945

menyediakan mekanisme perubahan konstitusi. Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan, setiap konstitusi di dunia memang memungkinkan adanya amandemen.

1

Anggota MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, mengusulkan agenda amandemen.

2

Agenda tersebut harus disetujui oleh dua per tiga dari total anggota MPR jika ingin diproses.

3

Setelah disetujui, agenda pembahasan dimulai. Dalam pembahasan, dua per tiga anggota MPR harus hadir.

4

Kalau hadir semua, persetujuan amandemen harus disetujui lebih dari 50 persen total anggota MPR.

“Kenapa figur-figur yang menciptakan polarisasi itu maju kembali? Harusnya mereka tidak diperpanjang, mereka dibatasi.”

FERI AMSARI

PAKAR HUKUM TATA NEGARA DARI UNIVERSITAS ANDALAS

MUHAMMAD QODARI
JOKOWI
DAN PRABOWO

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan Jokowi dan Prabowo dapat berpasangan di Pilpres 2024 demi mengatasi polarisasi masyarakat yang terbelah sejak 2014.

FERI AMSARI
PENYEBAB
POLARISASI

Feri Amsari menilai para calon presiden dalam beberapa pemilihan terakhir bukanlah figur yang terlalu kredibel untuk mempersatukan bangsa. Menurut dia, merekalah yang membangun polarisasi tersebut.

AMIEN RAIS
UPAYA
AMANDEMEN

Amien Rais mengatakan ada upaya untuk melakukan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode

TEMPO.CO

Sumber: Tempo.co

Desain: Moerat Sitompul